**KAJI ULANG KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMENUHAN
11 HAK DASAR PENDUDUK MISKIN PADA KABUPATEN GRESIK
PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011**

Oleh
Nugrahini Susantinah Wisnujati
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRACT

Poverty is understood not only as an economic inability to meet physical needs (physiological deprivation), but also a failure to fulfill basic rights, and different treatment for a person or group of people in living a life with dignity (sociological deprivation). The basic rights that must be fulfilled are the need for food, health, education, work and business, housing and sanitation, clean water, land, natural resources and the environment, a sense of security from treatment or threats of violence, and the right to participate in social life, politics, for both men and women. From the results of the study, it was found that the APBD used was Rp. 18,643,712,905 and the APBN is 51,153,897,562 or the budget used comes from the APBD is 26.7% and from the APBN is 73.28%. This is reinforced by the results of research in the community which turns out that the public only knows poverty alleviation which is funded by the state budget. Results Review of poverty reduction program policies and budgets shows that existing programs in the Office (SKPD) still use a lot of APBN funds, so that many people cannot be covered by programs from APBD funds. with 2 or more poverty groups/clusters. The fulfillment of basic rights for the people of Gresik Regency are those who fulfill the rights to food, health, education, employment, housing, sanitation and clean water. land and human resources and the environment.

Keywords: poverty, 11 basic rights, government policies, budget and income.

PENDAHULUAN

Penanggulangan kemiskinan terkait dengan mandat Undang – Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam beberapa pasal; pasal 27 ayat (2) " tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ", pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.

Ayat (2) setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Ayat (4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang – wenang oleh siapapun. Pasal 34 menyebutkan " fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Pasal tersebut yang semula ayat tunggal, pada amandemen keempat UUD 45 hal tersebut dipertegas lagi dengan menambah ayat-ayat baru, sehingga pasal 34 menjadi empat ayat.

Ayat (2) berbunyi "negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

Masyarakat berhak mendapat jaminan untuk dapat hidup layak sesuai dengan haknya sebagai manusia yang seutuhnya, apabila tidak terpenuhi hak-haknya maka masyarakat akan mengalami kemiskinan, sebagaimana disampaikan dalam RPJMD Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 pada Bab IX, bahwa kemiskinan dipahami tidak sebatas ketidakmampuan ekonomi memenuhi kebutuhan fisik (physiological deprivation), tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar, dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat (sociological deprivation). Hak-hak dasar yang harus terpenuhi adalah kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan dan sanitasi, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Pada upaya penghapusan kemiskinan di suatu negara, maka pemerintah berkewajiban membuat kebijakan, program yang mencerminkan dan mengarah pada penghormatan, perlindungan hingga pemenuhan hak dasar rakyat, yang dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) diformulasikan menjadi 10 hak.

Pendekatan berdasar hak ini merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang diamanatkan konstitusi, dimana negara harus menjamin hak warganya. Pendekatan ini dipakai mengingat secara ideologis saat ini negara-bangsa terancam oleh derasnya tekanan untuk masuk ke dalam arus neo-liberalisme-kapitalisme yang merupakan bentuk terkini kolonialisme dan imperialisme. Di sini persoalan kemiskinan akan diserahkan pada persoalan pelayanan publik semata dan semua diarahkan dalam kerangka ekonomi pasar. Peran dan tanggungjawab negara dieliminir. Sistem negara-bangsa yang demikian secara jelas menentang pasal 33 UUD 1945.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) jelas harus mengadopsi pendekatan ini, baik karena argumen dokumen di tingkat nasional maupun alasan konstitusional. Sedangkan prioritas dan formulasi hak tiap daerah dapat berbeda-beda.

Berbagai kebijakan publik telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kebijakan publik, baik langsung maupun tidak langsung, memiliki dampak terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Dampak pelaksanaan kebijakan publik dapat berupa perbaikan taraf hidup masyarakat miskin ataupun munculnya masyarakat miskin baru. Oleh sebab itu, kaji ulang perlu dilakukan untuk menilai dampak pelaksanaan kebijakan publik terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Kaji ulang kebijakan juga berguna untuk memahami seberapa jauh komitmen dan kemitraan berbagai pihak dalam penanggulangan kemiskinan.

Kaji ulang dilakukan terutama pada pengelolaan ekonomi makro yang mencakup kebijakan moneter dan fiskal, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin,

kependudukan, dan perwujudan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui pemenuhan 11 hak dasar oleh pemerintah pada masyarakat miskin di Kabupaten Gresik. Selain itu untuk mengetahui kebijakan Pemerintah pada Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dipilih secara purposive (sengaja) di kabupten Gresik dengan pertimbangan Kabupaten Gresik memiliki potensi CSR Perusahaan besar dan potensi alam yang kaya yang dapat diharapkan untuk dapat mendanai pembangunan di wilayahnya. Analisis data menggunakan analisis diskriptif, yakni menguraikan hasil penelitian dengan menggunakan kalimat serta diperjelas dengan menggunakan tabel dan gambar. Metode pengambilan data dengan menggunakan metode Focus Grup Discussion (FGD) pada Pemerintah Daerah. Pengambilan data di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan pada pertemuan SKPD atau Dinas di Kantor Pemerintah Daerah Gresik. Sekretaris TKPKD menyampaikan materi terlebih dahulu dan ditindak lanjuti dengan FGD., Pengambilan data juga dilaksanakan pada komunitas atau masyarakat dengan metode FGD.

Pengambilan responden dilaksanakan secara (purposive) sengaja, yakni para kepala Dinas yang ada di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Gresik, hal ini karena Para kepala Dinas yang mengalokasikan anggaran dan melaksanakan penanggulangan kemiskinan. Pengambilan responden juga dilaksanakan pada komunitas atau masyarakat dengan metode FGD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Luas Kabupaten Gresik adalah 1.191,25 km². Posisi 112 ° - 113° Bujur Timur, 7°- 8° Lintang Selatan, jumlah Kecamatan adalah 18 kecamatan, jumlah Desa adalah 330 Desa, dan jumlah Kelurahan adalah 26 Kelurahan. Jumlah Penduduk adalah 1.237.264, Laki-laki 622.776, Perempuan 614.488, Jumlah Keluarga 322 089. Visi Kabupaten Gresik yang Agamis, Adil, Makmur dan Berkehidupan Yang Berkualitas. Misi kabupaten Gresik adalah:

1. Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun, saling menghormati yang dilandasi oleh nilai nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri.
2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Angka kemiskinan di Kabupaten Gresik sebesar 16,89%, penduduk miskin banyak terdapat di 3 (tiga) Kecamatan yakni di Kecamatan Menganti, Dukun dan Kecamatan Benjeng.

PENUTUP

Pemenuhan hak dasar pada masyarakat Kabupaten Gresik adalah pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, perumahan, sanitasi dan air bersih. Hak dasar yang belum dapat terpenuhi adalah hak atas rasa aman, hak partisipasi, hak keadilan dan kesetaraan gender, hak akses tanah dan SDM dan lingkungan hidup. Hasil Kaji ulang kebijakan program penanggulangan kemiskinan dan anggaran menunjukkan bahwa program yang ada di Dinas (SKPD) masih banyak menggunakan dana APBN, sehingga banyak masyarakat yang belum dapat dicover oleh program dari dana APBD. Hasil dari kaji ulang menunjukkan masih terdapat SKPD yang melaksanakan penanggulangan kemiskinan dengan 2 atau lebih kelompok/ cluster kemiskinan.

Disarankan perlunya dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan pelaksana program Pemerintah Kabupaten Gresik. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk menyusun strategi penanggulangan kemiskinan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2007). Panduan Operasional P2TPD, Volume 5: Penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan, Jakarta.
- Anonim. (2010). Peraturan Departemen Dalam Negeri Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- Anonim. (2010). Peraturan Presiden No 15 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta.
- Bereiter, C. (2002), *Education and Mind in the Knowledge Age*. Erlbaum, Hillsdale, New York.
- Budiyana, Saefullah et al. (2003). *Pengorganisasian, Rakyat, Modul Pelatihan*, INCIS, Jakarta
- Darmawan, D. (2007). *Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Pustakamedia Daya, Bandung.
- Ferry, Brian and Kiggins, (1999), *Making Use of a Knowledge Building Community to Develop Professional Socialization*, University of Wollongong.
- Gofur, Abdul. (2007). *Panduan Advokasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Bagi Organisasi Masyarakat Sipil*, GAPRI, Jakarta.
- Roem, Topatimasang. (2000). *Merubah Kebijakan Publik*, Insist, Jogjakarta.
- Supartono, et al. (2007). *Panduan kajian Kemiskinan Partisipatif (Participatory Poverty Assesment)*, GAPRI, Jakarta.
- Johanes DM Arus et al. (2008). *Panduan Kaji Ulang Kebijakan*, GAPRI, Jakarta.